

PETUNJUK TEKNIS

Nomor 1 /Juknis/Eksternal/DPSP/2026

TENTANG

**Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana,
Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat
Berharga, dan Setelmen Dana Seketika**

**DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN**

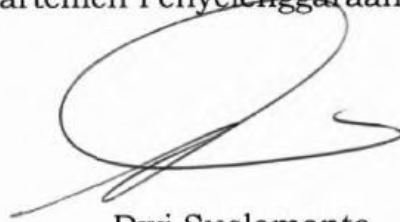
2026

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika, diperlukan layanan kepesertaan yang mengedepankan efisiensi, kemudahan, dan transparansi. Selanjutnya, untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam memperkuat struktur industri sistem pembayaran salah satunya dengan peningkatan kemampuan infrastruktur sistem pembayaran dalam pengelolaan risiko.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika, terdapat kebutuhan penyempurnaan terhadap proses pemberian izin sebagai peserta, *service level agreement* pemenuhan dokumen kepesertaan, simplifikasi struktur pengaturan, dan penguatan pengaturan terutama aspek kepesertaan bank dalam resolusi. Sebagai tindak lanjut penerbitan dari ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika, perlu disusun Petunjuk Teknis terkait kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika, yang dapat dijadikan sebagai acuan teknis bagi calon Peserta dan Peserta.

Plt. Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran



Dwi Suslamanto
Direktur

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK TEKNIS

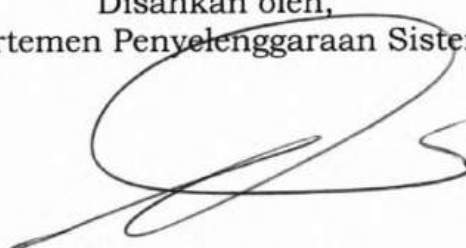
(Nomor 1 /Juknis/Eksternal/DPSP/2026)

TENTANG

Kepesertaan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan
Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika

Tempat pengesahan Petunjuk Teknis : Jakarta
Tanggal pengesahan Petunjuk Teknis : 1 September 2026
Tanggal pemberlakuan Petunjuk Teknis : 1 September 2026

Disahkan oleh,
Plt. Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran



Dwi Suslamanto
Direktur

DAFTAR ISI

BAB I
KETENTUAN UMUM..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Tujuan..... 2
D. Definisi atau Batasan Pengertian 2
E. Ruang Lingkup 4

BAB II
PROSEDUR MENJADI PESERTA 5

BAB III
PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN 6

BAB IV
PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN..... 8

DAFTAR PUSTAKA 10
DAFTAR LAMPIRAN..... 14

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Bank Indonesia selaku penyelenggara layanan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika, senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada peserta dalam penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP).

Untuk mewujudkan layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika yang mengedepankan efisiensi, kemudahan, dan transparansi, Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan proses dan mekanisme kepesertaan. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia dalam memperkuat struktur industri sistem pembayaran, antara lain melalui peningkatan kemampuan infrastruktur sistem pembayaran dalam pengelolaan risiko.

Berdasarkan hasil evaluasi kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika, terdapat kebutuhan penyempurnaan pengaturan, antara lain terkait proses pemberian persetujuan kepesertaan, *service level agreement* (SLA) pemenuhan dokumen kepesertaan, simplifikasi struktur pengaturan, serta penguatan pengaturan mengenai penanganan Peserta bank yang berstatus bank dalam resolusi. Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun Petunjuk Teknis mengenai Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

B. Dasar Hukum

Kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran; dan
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Tahun 2026 tentang Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis tentang Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika disusun sebagai pedoman bagi calon Peserta dan Peserta dalam pengelolaan kepesertaan pada penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika.

D. Definisi atau Batasan Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Transaksi adalah transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan.
2. Penatausahaan adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen, serta pembayaran kupon atau bunga, atau imbalan dan pelunasan pokok atau nominal atas hasil transaksi surat berharga dan hasil transaksi tanpa surat berharga.
3. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
4. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana.
5. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
6. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.
7. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
8. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Transaksi yang dilakukan secara elektronik.
9. Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukan sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem dalam kegiatan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan surat berharga, dan Setelmen Dana seketika.
10. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan peserta BI-SSSS.
11. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara sebagai peserta BI-SSSS, untuk melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
12. Peserta Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
13. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan

- Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana Peserta yang bersangkutan.
14. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI Peserta yang bersangkutan dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank pembayar.
 15. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara tidak langsung melalui bank penerus dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank penerus.
 16. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta pada Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
 17. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan Setelmen atas Transaksi surat berharga, Transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau Transaksi pasar keuangan.
 18. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan pada BI-SSSS.
 19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
 20. Bank umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 21. Bank Pembayar adalah bank pembayar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai:
 - a. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal;
 - b. penyelenggaraan transaksi; dan
 - c. penyelenggaraan penatausahaan Surat Berharga.
 22. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk melaksanakan pengiriman data keuangan elektronik, penyediaan *prefund*, Setelmen Dana, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya untuk kepentingan PTL.
 23. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara untuk penyelenggaraan kegiatan pertukaran warkat debit.
 24. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator PWD adalah koordinator pertukaran warkat debit kantor Bank Indonesia dan koordinator pertukaran warkat debit selain Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran warkat debit di Wilayah Kliring.
 25. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di Wilayah Kliring yang ditunjuk untuk mewakili Peserta dalam melaksanakan pertukaran warkat debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut.
 26. Nasabah Bank Indonesia adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
 27. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.

28. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara daring yang disediakan kepada Nasabah Bank Indonesia untuk mengakses layanan kebanksentralan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
29. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
30. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat debit.
31. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim tagihan kepada 1 (satu) atau beberapa penerima tagihan.
32. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
33. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank Umum melalui Layanan Kliring Warkat Debit.
34. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau lembaga selain Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau infrastruktur sistem pembayaran.
35. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah PSP yang menyelenggarakan infrastruktur untuk memfasilitasi pemindahan dana bagi kepentingan pesertanya.
36. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah PSP yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
37. Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh:
 - a. PSP, dan/atau
 - b. Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI.
38. Rencana Bisnis Sistem Pembayaran yang selanjutnya disingkat RBSP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem pembayaran dalam jangka pendek dan strategi untuk merealisasikan rencana tersebut serta realisasi rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem pembayaran tahun sebelumnya.

E. Ruang Lingkup

Kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika meliputi kepesertaan pada Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP.

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP, sebagai berikut:

1. prosedur menjadi Peserta;
2. perubahan data kepesertaan;
3. perubahan status kepesertaan.

BAB II PROSEDUR MENJADI PESERTA

A. Tahapan Menjadi Peserta

Tahapan calon Peserta untuk menjadi Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP dilakukan sebagai berikut:

1. calon Peserta mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan.
2. Permohonan untuk menjadi Peserta diajukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan kebanksentralan.

Permohonan untuk menjadi Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. menggunakan contoh format surat sebagaimana **Lampiran 1** pada petunjuk teknis kepesertaan ini dan dapat diakses oleh calon Peserta melalui laman resmi Bank Indonesia;
2. ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta;
3. ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, dalam hal kantor pusat calon Peserta berkedudukan di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri; dan
4. dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PADG Kepesertaan.

Dalam hal diperlukan, calon Peserta harus memperlihatkan dokumen asli atas dokumen yang dipersyaratkan pada angka 4.

Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh calon PTL harus dilakukan oleh PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerima. Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh calon PTL harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerima harus melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerima menyampaikan surat penerusan permohonan calon PTL kepada Penyelenggara apabila dokumen telah lengkap dan sesuai. Format surat yang harus dilengkapi oleh calon PTL adalah sebagaimana **Lampiran 1**.

BAB III PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

A. Prosedur Perubahan Data Kepesertaan

Dalam pelaksanaan perubahan data kepesertaan, Peserta dapat melakukan perubahan data kepesertaan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Peserta menyampaikan permohonan perubahan data kepesertaan dan dokumen pendukung kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan.
2. Perubahan data kepesertaan untuk Peserta SKNBI berupa PTL terkait:
 - a) nama Peserta;
 - b) kegiatan usaha;
 - c) kode Peserta (*participant code*);
 - d) kuasa;
 - e) Bank Penerus;
 - f) pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring;
 - g) data pimpinan; dan/atau
 - h) alamat kantor,
 diajukan oleh PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus.
3. Permohonan perubahan data kepesertaan disampaikan:
 - a) melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan;
 - b) harus menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis yang dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c) ditandatangani oleh pimpinan Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
4. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan melalui surat yang penyampaian dilaksanankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
5. Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan dilakukan paling lama:
 - a) 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar; atau
 - b) 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk perubahan penggunaan infrastruktur.
6. Dalam pemberian persetujuan perubahan data kepesertaan, Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif perubahan data kepesertaan yang berupa:
 - a) nama Peserta;
 - b) kegiatan usaha;
 - c) jenis kepesertaan untuk SKNBI;
 - d) kode Peserta (*participant code*);
 - e) kuasa;
 - f) Bank Penerus;
 - g) pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring;
 - h) Bank Pembayar untuk PLA, Peserta Sistem BI-ETP, dan/atau Peserta BI-SSSS;
 - i) pihak lain yang diwakili oleh Peserta Sistem BI-ETP dalam melakukan Transaksi Sistem BI-ETP;

- j) penggunaan layanan *payment versus payment* Sistem BI-RTGS; dan
 - k) nomor Rekening Setelmen Dana untuk Peserta Sistem BI-RTGS.
7. Permohonan perubahan data kepesertaan harus dilengkapi dengan surat dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2**.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN

A. Tahapan Perubahan Status Kepesertaan Atas Permintaan Peserta

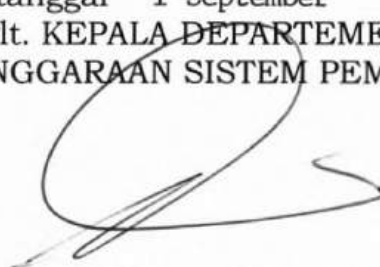
Permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status dari aktif menjadi ditutup dilakukan oleh Peserta dengan mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada Penyelenggara yang disertai dengan alasan perubahan status kepesertaan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.

Permintaan tertulis dari Peserta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. menggunakan format surat sebagaimana **Lampiran 3** dalam Petunjuk Teknis ini;
2. ditandatangani oleh pimpinan Peserta; dan
3. dilengkapi dengan dokumen pendukung perubahan status kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PADG Kepesertaan.

Petunjuk Teknis Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2026
Plt. KEPALA DEPARTEMEN
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN,



DWI SUSLAMANTO
DIREKTUR

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2026 tentang Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

21

DAFTAR LAMPIRAN

KELOMPOK	NAMA DOKUMEN LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Permohonan Menjadi Peserta Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan Sistem BI-ETP
	Data Kepesertaan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan Sistem BI-ETP
	Surat Pernyataan Kesiapan Perangkat Teknologi Informasi
	Surat Permohonan Untuk Mendapatkan User Dan Perangkat Pengamanannya
	Surat Pernyataan Penggunaan Infrastruktur Penyelenggara Penunjang/Pihak Lain
	Surat Pernyataan Pimpinan Bahwa Calon Peserta dan Peserta Telah Memiliki Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Yang Dikelola Oleh Penyelenggara Penunjang/Pihak Lain
	Surat Pemberitahuan Mengenai Nama dan Jabatan Pimpinan yang akan Melakukan Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP
	Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian
	Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan
	Daftar Nama Pihak yang Diwakili dan/atau Informasi Pihak yang Diwakili oleh Peserta Dalam Melakukan Transaksi
	Surat Penunjukan Peserta Sistem BI-ETP
	Surat Konfirmasi sebagai <i>Sub-Registry</i>
	Surat Penunjukan Bank Pembayar Peserta BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP; dan Surat Penunjukan Bank Pembayar/Bank Penerus SKNBI
	Surat Konfirmasi Bank Pembayar Peserta Sistem BI-ETP dan/atau BI-SSSS; dan Surat Konfirmasi Bank Pembayar/Bank Penerus Peserta SKNBI
	Surat Kuasa
	Surat Kuasa (Pejabat)
	Surat Permohonan Menjadi Bank Penerus
Lampiran 2	Surat Permohonan Perubahan Kegiatan Usaha
	Surat Pernyataan Tetap Diberlakukannya Spesimen Tanda Tangan Pimpinan
	Surat Permohonan Penambahan dan/atau Pergantian Kuasa Pejabat yang Berwenang dan/atau Petugas
	Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa
	Surat Permohonan Perubahan Bank Penerus Peserta SKNBI
	Surat Permohonan Perubahan Lokasi Infrastruktur Peserta dan/atau Pemindahan Jaringan Komunikasi Data Peserta
	Surat Permohonan Penambahan Atau Penghentian Keikutsertaan Peserta Dalam Wilayah Kliring
Lampiran 3	Surat Permohonan Penutupan Kepesertaan
	Surat Pemberitahuan Peserta Yang Menerima Penggabungan/ Peserta Hasil Peleburan/Peserta Hasil Pemisahan
	Surat Pernyataan Pimpinan Bahwa Calon Peserta Tidak Sedang Dalam Proses Likuidasi Atau Kepailitan Bagi Calon Peserta Tidak Langsung
	Surat Pernyataan Dari Peserta Yang Menerima Penggabungan/ Peleburan/Pemisahan

31

SURAT PERMOHONAN MENJADI PESERTA SISTEM BI-RTGS

No. ¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal: **Surat Permohonan Menjadi Peserta Sistem BI-RTGS**

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP, dengan ini kami ...² (atas nama sendiri/atas nama Unit Usaha Syariah (UUS))³ mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta Sistem BI-RTGS.

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kelengkapan dokumen menjadi Peserta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	CHECKLIST
1.	Data kepesertaan	√
2.	Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih berlaku dari lembaga berwenang	√
3.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa calon Peserta telah memenuhi permodalan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan permodalan	√
4.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi informasi dilengkapi dengan bukti pendukung	√
5.	Surat permohonan dari pimpinan calon Peserta untuk mendapatkan <i>user</i> dan/atau <i>digital certificate</i>	√
6.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain pimpinan	√
7.	Surat kuasa dari pimpinan terkait dengan kepesertaan dan operasional Sistem BI-RTGS	√
8.	Surat permohonan dari pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan untuk membuat spesimen tanda tangan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepesertaan dan operasional Sistem BI-RTGS	√
9.	Laporan hasil audit sistem informasi calon Peserta yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen	√
10.	Surat pernyataan dari Pimpinan yang menyatakan bahwa audit sistem informasi dilaksanakan secara independen, dalam hal audit sistem informasi dilakukan oleh auditor internal	√
11.	Laporan keuangan posisi 2 (dua) tahun terakhir ⁴	√
12.	Surat pernyataan sedang mengajukan pembukaan rekening giro rupiah, dalam hal calon Peserta belum memiliki rekening giro ⁵	√
13.	Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan pimpinan yang akan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS	√

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan
² Diisi dengan nama Institusi.
³ Diisi dan dipilih dalam hal calon Peserta adalah Bank.
⁴ Persyaratan ini berlaku untuk calon Peserta lembaga selain bank.
⁵ Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

NO	JENIS DOKUMEN	CHECKLIST
14.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional	√
15.	Dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet yang diterbitkan oleh lembaga pengawas yang berwenang	√
16.	Surat pernyataan dari calon Peserta Sistem BI-RTGS yang menyatakan bahwa telah melaksanakan uji tuntas	√
17.	Surat pernyataan dari Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur calon Peserta	√
18.	a. Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang dan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang; dan/atau b. telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis internal Peserta yang mencakup muatan perjanjian, dalam hal merupakan unit usaha syariah	√
19.	Surat pernyataan dari pimpinan calon peserta yang menyatakan bahwa pimpinan calon peserta tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap	√
20.	Surat rekomendasi dapat menjadi Peserta dari otoritas pengawas yang berwenang ⁶	√

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan kepesertaan adalah:

Nama :
Telepon/HP :
E-mail :

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel institusi

(Nama Pimpinan)
(Jabatan)

⁶ Dalam hal calon peserta merupakan penyelenggara kliring dan/atau setelmen.

79

SURAT PERMOHONAN MENJADI PESERTA LANGSUNG AFILIASI (PLA)

No. ¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Permohonan Menjadi PLA**

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menjadi PLA dalam penyelenggaraan SKNBI. Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	CHECKLIST
		PLA
1.	Data kepesertaan	√
2.	Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih berlaku dari lembaga berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau telah dinyatakan sesuai aslinya oleh pimpinan calon Peserta	√ ²
3.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi informasi dilengkapi dengan bukti pendukung	√
4.	Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan <i>user</i> dan/atau <i>digital certificate</i>	√
5.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta terkait dengan kepesertaan dan operasional SKNBI	√
6.	Surat permohonan dari pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan untuk membuat spesimen tanda tangan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan operasional SKNBI	√
7.	Laporan hasil <i>security audit</i> atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen	√
8.	Surat pernyataan dari Pimpinan yang menyatakan bahwa <i>security audit</i> dilaksanakan secara independen, dalam hal <i>security audit</i> dilakukan oleh auditor internal	√
9.	Data lokasi kantor cabang ³	√
10.	Laporan keuangan posisi 2 (dua) tahun terakhir	√
11.	Surat penunjukan Bank Pembayar ⁴ dari pimpinan atau pejabat calon Peserta	√
12.	Surat konfirmasi dari Bank Pembayar terkait kesediaan sebagai Bank Pembayar ³	√
13.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa pimpinan calon Peserta tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap	√
14.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional	√

Adapun pejabat kami yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan kepesertaan adalah:

Nama :
Telepon/HP :
E-mail :

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)
Tanda tangan dan stempel perusahaan
(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan
² Dokumen ini hanya disampaikan oleh calon Peserta yang merupakan unit usaha syariah atau PLA yang merupakan PJP berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas penerusan transaksi pembayaran dan/atau PJP berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana.
³ Dokumen ini hanya disampaikan oleh calon PTL kepada PLU dan tidak perlu disampaikan ke Penyelenggara.
⁴ Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

SURAT PERMOHONAN MENJADI PESERTA LANGSUNG UTAMA (PLU)

No.....¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Permohonan Sebagai PLU**

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP, dengan ini kami ⁵ atas nama (sendiri/Unit Usaha Syariah (UUS))⁶ mengajukan permohonan untuk dapat menjadi PLU dalam penyelenggaraan SKNBI. Untuk bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	CHECKLIST
		PLU
1.	Data kepesertaan	√
2.	Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih berlaku dari lembaga berwenang	√ ²
3.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi informasi dilengkapi dengan bukti pendukung	√
4.	Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan <i>user</i> dan/atau <i>digital certificate</i>	√
5.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta terkait dengan kepesertaan dan operasional SKNBI	√
6.	Surat permohonan dari pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan untuk membuat spesimen tanda tangan bagi bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan operasional SKNBI	√
7.	Laporan hasil <i>security audit</i> atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen, dalam hal calon Peserta akan menghubungkan sistem internal ke Infrastruktur Penyelenggara	√
8.	Surat pernyataan dari Pimpinan yang menyatakan bahwa <i>security audit</i> dilaksanakan secara independen, dalam hal <i>security audit</i> dilakukan oleh auditor internal	√
9.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional	√
10.	Dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet yang diterbitkan oleh lembaga pengawas yang berwenang	√
11.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa pimpinan calon Peserta tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap	√
12.	Surat pernyataan dari Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur untuk calon Peserta SKNBI	√
13.	Surat pernyataan dari calon Peserta SKNBI yang menyatakan bahwa telah melaksanakan uji tuntas	√
14.	Surat pernyataan bermaterai dari Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur calon Peserta	√
15.	a. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang/pihak lain, dan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang/pihak lain; dan/atau b. Telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis internal Peserta yang mencakup muatan perjanjian, dalam hal merupakan unit usaha syariah dan/atau <i>Sub-Registry</i>	√

⁵ Diisi nama calon PLU, dalam hal calon PLU adalah UUS, diisi nama Bank konvensional dari UUS.

⁶ Dipilih salah satu.

Adapun pejabat kami yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan kepesertaan adalah:

Nama :
Telepon/HP :
E-mail :

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel perusahaan

(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

25

SURAT PERMOHONAN MENJADI PESERTA TIDAK LANGSUNG (PTL)

No. ¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Permohonan Menjadi PTL**

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP, dengan ini kami mengajukan permohonan atas nama:

Nama :
Alamat :
untuk menjadi PTL.

Dapat kami sampaikan bahwa kami telah ditunjuk oleh ...⁷ sebagai Bank Penerus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	SKNBI
		PTL
1.	Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih berlaku dari otoritas berwenang	√ ⁸
2.	Perjanjian dengan Bank Penerus	√
3.	Surat penunjukan Bank Penerus ⁴	√
4.	Surat konfirmasi PLU terkait kesediaan sebagai Bank Penerus ⁹	√
5.	Surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana dari Bank Penerus kepada Penyelenggara ³	√

Adapun pejabat kami yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan kepesertaan adalah:

Nama :
Telepon/HP :
E-mail :

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel perusahaan

(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

⁷ Diisi nama calon PTL.

⁸ Dokumen ini hanya disampaikan oleh calon PTL kepada PLU dan tidak perlu disampaikan ke Penyelenggara.

⁹ Surat ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

SURAT PERMOHONAN MENJADI PESERTA BI-SSSS

Nomor : ¹

Kepada:
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Permohonan Menjadi Peserta BI-SSSS**

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP, bersama ini kami (atas nama sendiri/atas nama unit usaha syariah (UUS)/atas nama unit atau divisi Kustodian)² menyampaikan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	BI-SSSS		
		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PELAKSANA KLIRING DAN PENJAMINAN
1.	Data kepesertaan	√	√	√
2.	Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih berlaku dari lembaga berwenang	√	√	√
3.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa calon Peserta telah memenuhi permodalan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan permodalan	√	√	√
4.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi informasi dilengkapi dengan bukti pendukung	√	√	√
5.	Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan <i>user</i> dan/atau <i>digital certificate</i>	√	√	√
6.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain pimpinan	√	√	√
7.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta terkait dengan kepesertaan dan operasional BI-SSSS	√	√	√
8.	Surat permohonan dari pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan untuk membuat spesimen tanda tangan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan operasional BI-SSSS	√	√	√
9.	Laporan hasil <i>security audit</i> atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen, dalam hal calon Peserta akan menghubungkan sistem internal ke Infrastruktur Penyelenggara	√	√	√
10.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa <i>security audit</i> dilaksanakan secara independen, dalam hal <i>security audit</i> dilakukan oleh auditor internal	√	√	√
11.	Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan pimpinan calon Peserta yang akan	√	√	√

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan.

² Dipilih salah satu.

NO	JENIS DOKUMEN	BI-SSSS		
		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PELAKSANA KLIRING DAN PENJAMINAN
	melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan BI-SSSS			
12.	Surat penunjukan Bank Pembayar ³	-	√	√
13.	Surat konfirmasi dari Bank Pembayar terkait kesediaan sebagai Bank Pembayar	-	√	√
14.	Surat persetujuan atau izin usaha sebagai Kustodian yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang	-	√	-
15.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa pengelola calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga	-	√	-
16.	Surat keterangan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> mengenai sistem penatausahaan Surat Berharga dan fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga yang terintegrasi antarkantor yang dimiliki di dalam negeri	-	√	-
17.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga tanpa warkat (<i>scripless</i>) yang aman dan akurat	-	√	-
18.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga yang paling sedikit dapat menatausahakan transaksi <i>outright</i> , repo, dan pengagungan (<i>pledge</i>)	-	√	-
19.	Surat izin dan/atau persetujuan melakukan kegiatan kliring dan penjaminan yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang	-	-	√
20.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan yang menyatakan bahwa pengelola calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin dan/atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang	-	-	√
21.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan yang menyatakan bahwa calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan memiliki sistem yang digunakan untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan yang aman, akurat, dan terpercaya	-	-	√
22.	Dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet yang diterbitkan oleh lembaga pengawas yang berwenang	√	√	√
23.	Data mengenai jumlah dan nilai nominal pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir ⁴	-	√	-
24.	Surat pernyataan dari Pihak lain yang mengelola infrastruktur untuk calon Peserta ⁵	√	√	√

³ Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

⁴ Tidak berlaku bagi calon Peserta *Sub-Registry* yang akan menerima pengalihan aset dan kewajiban.

⁵ Dalam hal calon peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan Pihak lain.

NO	JENIS DOKUMEN	BI-SSSS		
		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB- REGISTRY	PESERTA PELAKSANA KLIRING DAN PENJAMINAN
25.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta telah memiliki perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur BI-SSSS yang dikelola oleh Pihak lain	√	√	√
26.	a. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang/pihak lain, dan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang/pihak lain; dan/atau b. telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis internal Peserta yang mencakup muatan perjanjian, dalam hal merupakan unit usaha syariah dan/atau <i>Sub-Registry</i> .			
27.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa pengelola calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga ⁶	-	√	-
28.	Surat pernyataan dari pimpinan Peserta <i>Sub-Registry</i> lain mengenai pengalihan pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga kepada calon Peserta <i>Sub-Registry</i> ⁷	-	√	-
29.	Surat keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antarkantor cabang yang dimiliki di dalam negeri ⁵	-	√	-
30.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional	√	√	√

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan kepesertaan kami adalah sebagai berikut:

Nama :
Telepon/HP :
Email :

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tanda tangan dan stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

⁶ Dalam hal calon peserta sebagai *Sub-Registry* yang menerima pengalihan aset dan kewajiban.

⁷ Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

SURAT PERMOHONAN MENJADI PESERTA SISTEM BI-ETP

Nomor : ¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Permohonan Menjadi Peserta Sistem BI-ETP**

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP bersama ini kami (atas nama sendiri/atas nama unit usaha syariah (UUS))² menyampaikan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta dengan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	CHECKLIST
1.	Data kepesertaan	√
2.	Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih berlaku dari lembaga berwenang	√
3.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi informasi dilengkapi dengan bukti pendukung	√
4.	Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan <i>user</i> dan/atau <i>digital certificate</i>	√
5.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain pimpinan calon Peserta	√
6.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta terkait dengan kepesertaan dan operasional Sistem BI-ETP	√
7.	Surat permohonan dari pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta untuk membuat spesimen tanda tangan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan operasional Sistem BI-ETP	√
8.	Laporan hasil <i>security audit</i> atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen	√
9.	Surat pernyataan dari Pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa <i>security audit</i> dilaksanakan secara independen, dalam hal <i>security audit</i> dilakukan oleh auditor internal	√
10.	Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan pimpinan calon Peserta yang akan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan Sistem BI-ETP	√
11.	Surat penunjukan Bank Pembayar ³ dari pimpinan/pejabat calon Peserta	√
12.	Surat konfirmasi dari Bank Pembayar terkait kesediaan sebagai Bank Pembayar	√
13.	Daftar Nama Pihak Yang Diwakili dan/atau Informasi Pihak yang Diwakili Oleh Peserta Dalam Melakukan Transaksi Sistem BI-ETP	√
14.	Surat penunjukan <i>Sub-Registry</i> dan/atau Peserta BI-SSSS lain sebagai agen setelmen transaksi Surat Berharga, dalam hal Peserta Sistem BI-ETP tidak memiliki Rekening Surat Berharga ⁴	√
15.	Surat konfirmasi dari <i>Sub-Registry</i> dan/atau Peserta BI-SSSS lain terkait kesediaan sebagai agen setelmen transaksi di Sistem BI-	√

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan.
² Dipilih salah satu.
³ Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia

NO	JENIS DOKUMEN	CHECKLIST
	ETP, dalam hal Calon Peserta Sistem BI-ETP tidak memiliki Rekening Surat Berharga	
16.	Surat pernyataan dari Pihak lain yang mengelola infrastruktur untuk calon Peserta ⁴	√
17.	a. Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain, dan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak lain; dan/atau b. telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis internal Peserta yang mencakup muatan perjanjian, dalam hal merupakan unit usaha syariah.	√
18.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa pimpinan calon Peserta tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap	√
19.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional	√
20.	Dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet yang diterbitkan oleh lembaga pengawas yang berwenang	√

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan kepesertaan kami adalah sebagai berikut:

Nama :
Telepon/HP :
Email :

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tanda tangan dan stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan]
Jabatan

⁴ Dalam hal calon peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan Pihak lain.

76

DATA KEPESERTAAN SISTEM BI-RTGS

I.

☐ Informasi Baru

☐ Perubahan/Penambahan Informasi¹

II.

Nama Peserta :
Nama Pendek Peserta :

III.

Alamat Peserta
Gedung :
Jalan :
Kota/Kabupaten :
Provinsi :
Telepon :
E-mail :

IV. KEPESERTAAN DI SISTEM BI-RTGS

A. INSTITUSI

☐ PJP berupa Bank Umum

☐ PSP (Bank Umum atau PIP)¹

☐ Pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Bank Indonesia

B. JENIS BANK

☐ Bank Konvensional

☐ Kantor Cabang Bank Asing

☐ Bank Syariah

☐ Unit Usaha Syariah

V.

C. KEWENANGAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG DIGUNAKAN

☐ Peserta☐ Penyelenggara Penunjang:

Participant Code :²

Member Code SWIFT :³

VI. LOKASI RTGS PAYMENT GATEWAY, RTGS STP GATEWAY, DAN BI-RTGS PAYMENT GATEWAY BERBASIS WEB

Uraian	RTGS Payment Gateway, RTGS STP Gateway, dan BI-RTGS Payment Gateway berbasis web Utama	RTGS Payment Gateway dan/atau RTGS STP Gateway Cadangan
Gedung		
Lantai		
Jalan		
Kota/Kab.		
Propinsi		
Telepon/e-mail		

VII. PENGGUNAAN APLIKASI

☐ RTGS Payment Gateway

☐ BI-RTGS STP Gateway

☐ BI-RTGS Payment Gateway berbasis web

☐ RTGS Payment Gateway dan BI-RTGS STP Gateway dan BI-RTGS Payment Gateway berbasis web secara bersamaan

¹ Dalam hal terjadi perubahan data, Peserta hanya mengisi kolom data yang mengalami perubahan.
² Diisi oleh Peserta sesuai dengan participant code di Sistem BI-RTGS.
³ Diisi dengan SWIFT BIC Code dalam hal calon Peserta merupakan anggota SWIFT.

26

VIII. **SISTEM YANG TERHUBUNG DENGAN RTGS PAYMENT GATEWAY DAN/ATAU BI-RTGS STP GATEWAY**

No.	Nama Sistem	Metode Pengamanan
1.		
2.		
3.		
dst.		

IX. **CONTACT PERSON UNTUK OPERASIONAL BI-RTGS:**

No.	Nama	Jabatan	Telepon / E-mail
1.			
2.			
3.			
dst.			

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel institusi

(Nama Pimpinan / Pejabat Penerima Kuasa)
(Jabatan)

75

DATA KEPESERTAAN SKNBI

1.

Nama Peserta

:
2.

Nama Singkat Peserta

:
3.

Jenis Institusi

:

Bank Umum/PJP berupa lembaga selain bank⁴
4.

Jenis Bank

:

Bank Konvensional/Kantor Cabang Bank Asing/Unit Usaha Syariah/Bank Syariah⁵
5.

Jenis Usaha

:

Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank⁶
6.

Jenis Kepesertaan

:

Peserta Langsung Utama/Peserta Langsung Afiliasi/Peserta Tidak Langsung⁷
7.

Jenis Layanan⁶

:

☐

Layanan Transfer Dana

☐

Layanan Kliring Warkat Debit

☐

Layanan Pembayaran Reguler

☐

Layanan Penagihan Reguler

8.

Rekening Giro⁸

:

9.

Kode Peserta RTGS ⁹

:

10.

Alamat kantor

a.

Gedung

:

b.

Jalan

:

c.

Telepon

:

11.

Infrastruktur sistem peserta kliring (SPK) Utama:

a.

Konfigurasi SPK

:

1 server / 2 server⁷

b.

Tipe server

:

Tipe 1 / Tipe 2 / Tipe 3⁷

Komponen	Spesifikasi	Jumlah
Processor		
RAM		
Hard Disk		
Operating System		
Application Server		
Database Server		
Application		

- c.

Lokasi Infrastruktur SPK Utama

-

Gedung

:

-

Lantai

:

-

Jalan

:

-

Telepon

:

-

e-mail

:

⁴

Pilih salah satu.

⁵

Diisi jika calon Peserta adalah Bank dan pilih salah satu.

⁶

Khusus untuk PLA dan PTL.

⁷

Pilih salah satu.

⁸

Diisi jika calon Peserta Langsung memiliki Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia.

⁹

Diisi apabila calon Peserta telah terdaftar sebagai peserta Sistem BI-RTGS.

31

12. Infrastruktur SPK Cadangan:

- a. Konfigurasi SPK : 1 server / 2 server⁷
- b. Tipe server : Tipe 1 / Tipe 2 / Tipe 3⁷

Komponen	Spesifikasi	Jumlah
Processor		
RAM		
Hard Disk		
Operating System		
Application Server		
Database Server		
Application		

- c. Jaringan Komunikasi Data (JKD) Cadangan dari Lokasi Cadangan (*back-up site*) ke Penyelenggara
 - Perusahaan Penyedia JKD :
 - *Bandwith* JKD :
- d. Lokasi Infrastruktur SPK Cadangan
 - Gedung :
 - Lantai :
 - Jalan :
 - Telepon :
 - *e-mail* :

13. Sistem lain yang terhubung dengan SPK:

- a. Nama Sistem :
- b. Metode Pengamanan :
- c. Vendor Pengembang :

14. *Contact Person* untuk operasional SPK:

- a. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Email :
- b. dst.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan

(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

DATA KEPESERTAAN BI-SSSS

I.

☐ Informasi Baru

☐ Perubahan/Penambahan Informasi¹⁰

II.

Nama Peserta:
Nama Pendek Peserta :

III.

Alamat Peserta
Gedung :
Jalan :
Kota/Kabupaten :
Provinsi :
Telepon :
Faksimile :

IV. **KEPESEERTAAN DI BI-SSSS**

A. INSTITUSI

☐ Bank Indonesia

☐ Kementerian Keuangan Republik Indonesia

☐ Bank Umum (Konvensional/Syariah/UUS)³

☐ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

☐ Perusahaan Efek

☐ Lainnya, sebutkan

B. FUNGSI

☐ Penerbit Surat Berharga

☐ Pemilik Surat Berharga di
Central Registry

☐ Sub-Registry

☐ Lainnya, sebutkan
.....

C. KEWENANGAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG DIGUNAKAN

☐ Peserta

☐ Pihak lain:

D. STATUS PESERTA DI SISTEM BI-RTGS

☐ Peserta Sistem BI-RTGS

☐ Bukan Peserta Sistem BI-RTGS

V.

Identifier Code :¹¹
Kode Peserta (*Participant Code*) :¹²
Nomor Tunggal Identitas Investor :¹³
(*Single Investor Identification*)

VI. **LOKASI SPP**

Uraian	SPP Utama	SPP Cadangan
Gedung		
Lantai		
Jalan		
Kota/Kab.		
Propinsi		
Telepon/Faksimile		

VII. **PENGUNAAN APLIKASI**

☐ BI-SSSS *Depository Gateway* (SDG)

☐ BI-SSSS *Straight Through Processing Gateway* (SSTPG)

☐ BI-SSSS *Depository Gateway* (SDG) dan BI-SSSS *Straight Through Processing Gateway* (SSTPG) secara bersamaan

61

VIII. **SISTEM YANG TERHUBUNG DENGAN SPP**

No.	Nama Sistem	Metode Pengamanan
1		
2		
3		
dst.		

IX. **CONTACT PERSON UNTUK OPERASIONAL BI-SSSS:**

No.	Nama	Jabatan	Telepon / E-mail
1			
2			
3			
dst.			

X. **DATA TAMBAHAN KHUSUS UNTUK BANK**

NO	INFORMASI	STATUS	KETERANGAN
1.	Kode Peserta di Sistem BI-RTGS	Mandatory	Sesuai kode di Sistem BI-RTGS (8 karakter)
2.	Nomor Rekening	Mandatory	Nomor Rekening Giro di Bank Indonesia (Peserta Sistem BI-RTGS)
3.	First Name/ Company Name	Mandatory	
4.	Middle Name	Optional	Jika First Name tidak cukup
5.	Last Name	Optional	Jika Middle Name tidak cukup
6.	KTP	Blank	Dikosongkan
7.	NPWP	Mandatory bagi institusi lokal	NPWP yang merupakan identitas
8.	Paspor	Blank	Dikosongkan
9.	Business Registration Number	Blank	Dikosongkan
10.	Tempat Lahir/ Comp. establishment place	Mandatory	Free text
11.	Tgl. Lahir/ Tgl. Pendirian	Mandatory	Format DDMMYYYY (Tanggal Bulan Tahun)
12.	Nationality/ Legal Domicile	Mandatory	Diisi dengan kode: ID
13.	Tipe Investor	Mandatory	Diisi dengan kode : IB
14.	Jenis Kelamin	Blank	Dikosongkan
15.	Jenis Pekerjaan	Blank	Dikosongkan
16.	Alamat Identitas	Mandatory	
17.	Alamat Identitas Lanjutan	Optional	
18.	Kode Kota	Mandatory	Sesuai kode kota Dukcapil (4 digit)
19.	Kode Provinsi	Mandatory	Sesuai kode provinsi Dukcapil (2 digit)
20.	Kode Negara	Mandatory	Diisi kode: ID
21.	No. Telepon	Optional	
22.	No. Handphone	Optional	
23.	Email	Mandatory	

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel institusi

(Nama Pimpinan/Pejabat Penerima Kuasa)
(Jabatan)

¹⁰ Dalam hal terjadi perubahan data, Peserta hanya mengisi kolom data yang mengalami perubahan.
¹¹ Diisi dengan SWIFT BIC Code dalam hal calon Peserta merupakan anggota SWIFT.
¹² Diisi oleh Peserta BI-SSSS sesuai dengan participant code di BI-SSSS.
¹³ Diisi oleh Peserta yang berfungsi sebagai pemilik Surat Berharga di Central Registry.

31

DATA KEPESERTAAN SISTEM BI-ETP

I.

☐ Informasi Baru
☐ Perubahan/Tambahan Informasi

II.

Nama Lembaga :

III.

Alamat Institusi
Gedung :
Jalan :
Telepon :

IV. KEPESERTAAN SISTEM BI-ETP

A. INSTITUSI

☐ Bank Indonesia
☐ Kementerian Keuangan
☐ Lembaga Penjamin Simpanan
☐ Bank Umum konvensional/syariah/UUS)¹⁴
☐ Perusahaan Efek
☐ Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
☐ Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia

B. PERAN

☐ Penerbit Surat Berharga
☐ Peserta Operasi Moneter
☐ Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter
☐ Peserta transaksi SBN di pasar perdana
☐ Peserta Transaksi Pasar Keuangan
☐ Fungsi lain yang ditetapkan Bank Indonesia

C. STATUS PESERTA DI SISTEM BI-ETP

☐ Peserta Sistem BI-RTGS
☐ Peserta BI-SSSS
☐ Bukan Peserta Sistem BI-RTGS
☐ Bukan Peserta BI-SSSS

Kode Peserta (*Participant Code*): Dikosongkan (Diisi BI)

V. DATA BANK PEMBAYAR¹⁵

Nama Bank Pembayar :

Kode Peserta (*Participant Code*) Bank Pembayar¹⁶ :

Nomor Rekening Giro Peserta di Bank Pembayar :

VI. LOKASI SISTEM BI-ETP

Uraian	Sistem BI-ETP Utama	Sistem BI-ETP Cadangan
Gedung		
Lantai		
Jalan		
Telepon		

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Diisi oleh calon Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS dan harus melampirkan surat konfirmasi dari Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan Transaksi melalui Sistem BI-ETP (pembebanan biaya Sistem BI-ETP dan pembebanan pengenaan sanksi administratif terkait Sistem BI-ETP).

¹⁶ Kode peserta Bank Pembayar di Sistem BI-RTGS.

VII. **CONTACT PERSON UNTUK OPERASIONAL SISTEM BI-ETP**

No.	Nama	Jabatan	Telepon/E-mail
1.			
2.			
3.			
dst.			

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel institusi

(Nama Pimpinan/Pejabat Penerima Kuasa)
(Jabatan)

Surat Pernyataan Kesiapan Perangkat Teknologi Informasi

SURAT PERNYATAAN

- Yang bertanda tangan di bawah ini:¹
- 1. Nama : ²
Jabatan : ³
Alamat : ⁴
 - 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
 - 3. Dst.

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...⁵ berdasarkan ...⁶ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...⁷, dengan ini menyatakan bahwa ...⁸ telah menyiapkan perangkat teknologi informasi (yang dikelola sendiri/yang dikelola pihak lain/dikelola Penyelenggara Penunjang atas nama ...⁹)¹⁰ untuk mengakses (Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹¹ sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika, sebagai berikut:

- 1. Spesifikasi *Server* Utama dan *Backup*
 - a. *Processor* :
 - b. *RAM* :
 - c. *Hard Disk* :
 - d. *Operating system* :
 - e. *RDBMS software* :
 - f. *Web server software* :
 - g. *Software* lainnya :
- 2. Spesifikasi *Workstation*
 - a. *Processor* :
 - b. *RAM* :
 - c. *Hard Disk* :
 - d. *Monitor* :
 - e. *Operating system* :
 - f. *Internet browser* :
 - g. *Software* lainnya :

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran dasar/Peraturan Daerah.
² Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan.
³ Diisi dengan jabatan pimpinan.
⁴ Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan.
⁵ Diisi dengan "direksi" untuk Peserta yang berbadan hukum PT atau diisi dengan jabatan pimpinan untuk Peserta yang merupakan institusi pemerintah.
⁶ Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut:
(anggaran dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal).
Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut:
(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....).
⁷ Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.
⁸ Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.
⁹ Diisi dengan nama pihak lain.
¹⁰ Pilih salah satu.
¹¹ Pilih salah satu.

6

3. Spesifikasi *database* Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS¹²
 - a. Max processor :.....
 - b. RAM :.....
 - c. *Database size* :.....
 - d. *Supported OS* :.....
 - e. 64 Bit *support* :.....
 - f. *Availability & scalability* :.....
 - g. *Real app cluster* :.....
 - h. *Active data guard* :.....
 - i. *Golden gate* :.....
 - j. *Security data encryption* :.....
 - k. *Manageability automatic database diagnostic and tuning* :.....
4. JKD
 - a. Jumlah pesan per hari : (< 1000/> 1000/> 20000)¹³
 - b. Layanan : (*Gold/Silver/Bronze*)¹⁴
5. Komponen pengamanan

Digital Certificate Hard Token : ¹⁵
Digital Certificate Soft Token : ¹⁶

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka (nama badan hukum) bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]

[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,-

[Tanda tangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan]
Jabatan

¹² Diisi dalam hal permohonan diajukan untuk menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS.

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Diisi jumlah *Digital Certificate Hard Token* yang diperlukan oleh calon Peserta/Peserta.

¹⁶ Diisi jumlah *Digital Certificate Soft Token* yang diperlukan oleh calon Peserta/Peserta BI-SSSS dan/atau Sistem BI-RTGS.

Surat Permohonan Untuk Mendapatkan User Dan Perangkat Pengamanannya

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Permohonan Untuk (Mendapatkan User dan Perangkat Pengamanannya)¹ Dalam Penyelenggaraan (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)²**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)³ dengan ini kami mengajukan permohonan untuk (mendapatkan user dan perangkat pengamanannya)⁴, dengan data-data sebagai berikut:

- 1. Nama Peserta : ⁵
- 2. Kode Peserta (*Participant code*) : ⁶
- 3. *Identifier code* : ⁶
- 4. Alamat *e-mail* penerima user :
- 5. Nomor telepon penerima user :
- 6. Masa Aktif : ⁷
- 7. Jumlah user Peserta Sistem BI-ETP :

No	Level User ⁸	Data User ⁹	Jabatan	Status
1	Administrator			Baru
2	Administrator			Baru
3	Supervisor			Baru
4	Supervisor			Baru
5	Operator			Baru
6	Operator			Baru
...				

8. Jumlah *connected user* Peserta BI-SSSS :

a. SDG

No	Connected user	Data User ¹⁰	Jabatan	Status
1	Connected user 1			Baru
2	Connected user 2			Baru
3				Baru
4	 dst			Baru

b. SSTPG

- 1) Nama jabatan untuk *connected user* 1:.....

¹ Pilih salah satu.
² Pilih salah satu
³ Pilih salah satu
⁴ Pilih salah satu.
⁵ Diisi apabila calon Peserta telah memiliki *participant code*.
⁶ Diisi apabila Calon Peserta telah memiliki SWIFT Code, khusus untuk mendapatkan user pada Sistem BI-RTGS.
⁷ Hanya dicantumkan dalam hal perpanjangan *Soft Token*, khusus SKNBI.
⁸ Diisi dengan kewenangan sesuai kebutuhan (*Default user* terdiri atas 2 user Administrator, 4 user Supervisor, dan 4 user Operator).
⁹ Diisi dengan Nama User, Nomor telepon User dan alamat email User.
¹⁰ Diisi dengan Nama User, Nomor telepon User dan alamat email User.

61

9. Jumlah user Peserta Sistem BI-RTGS :.....

a. RTGS Payment Gateway

No	Connected user	Data User ¹¹	Jabatan	Status
1	Connected user 1			Baru
2	Connected user 2			Baru
3				Baru
4	 dst			Baru

b. BI-RTGS Payment Gateway berbasis web

No	Connected user	Data User ¹²	Jabatan	Status
1	Connected user 1			Baru
2	Connected user 2			Baru
3				Baru
4	 dst			Baru

Demikian permohonan kami.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tanda tangan dan stempel badan
hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang
berwenang]
Jabatan

¹¹ Diisi dengan Nama User, Nomor telepon User dan alamat email User.
¹² Diisi dengan Nama User, Nomor telepon User dan alamat email User.

61

Surat Pernyataan Penggunaan Infrastruktur Penyelenggara Penunjang/Pihak Lain

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Pernyataan Penyelenggara Penunjang/Pihak Lain**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami:

- 1. Participant code ¹ :
- 2. Nama :
- 3. Alamat :

telah menyetujui penggunaan infrastruktur (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)² yang pengelolaannya dalam kewenangan kami oleh:

- 1. Nama institusi :
- 2. Identifier code ³ :
- 3. Alamat :

Berkaitan dengan penggunaan infrastruktur (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)⁴ tersebut, kami bersedia untuk memberikan akses, informasi, dan/atau data terkait kegiatan operasional (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)⁵ yang dilakukan oleh ⁶ kepada Penyelenggara dan tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengenai penyelenggaraan industri sistem pembayaran⁷ dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tanda tangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan Penyelenggara Penunjang
atau pihak lain]
Jabatan

¹ Diisi apabila pihak pengelola infrastruktur merupakan peserta BI-SSSS.
² Pilih salah satu
³ Diisi dengan SWIFT Code dalam hal calon Peserta/Peserta merupakan anggota SWIFT.
⁴ Pilih salah satu
⁵ Pilih salah satu
⁶ Nama calon Peserta/Peserta pengguna infrastruktur.
⁷ Dalam hal calon Peserta/Peserta merupakan calon Peserta dan/atau Peserta SKNBI dan/atau Sistem BI-RTGS.

Surat Pernyataan Pimpinan Bahwa Calon Peserta dan Peserta Telah Memiliki Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Yang Dikelola Oleh Penyelenggara Penunjang/Pihak Lain

No. ...¹

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:²

1.

Nama : ³

Jabatan : ⁴

Alamat : ⁵
2.

Nama :

Jabatan :

Alamat :
3.

Dst.

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...⁶ berdasarkan ...⁷ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...⁸, dengan ini menyatakan bahwa ...⁹ telah memiliki perjanjian penggunaan infrastruktur (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹⁰ dengan ...¹¹ sebagai Penyelenggara Penunjang atau Pihak lain yang mengelola infrastruktur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan industri sistem pembayaran¹² dan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar, maka ...¹³ bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Penyelenggara atau lembaga yang berwenang.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tanda tangan dan
stempel badan hukum]
[Nama Pimpinan]
Jabatan

1

Diisi dengan nomor surat pernyataan.

2

Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran dasar/Peraturan Daerah.

3

Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan.

4

Diisi dengan jabatan pimpinan.

5

Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan.

6

Diisi dengan "direksi" untuk Peserta yang berbadan hukum PT atau diisi dengan jabatan pimpinan untuk Peserta yang merupakan institusi pemerintah.

7

Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut:
(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal).

8

Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.

9

Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.

10

Pilih salah satu.

11

Diisi dengan nama pengelola infrastruktur yang digunakan calon Peserta/Peserta.

12

Dalam hal calon Peserta/Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI menggunakan Penyelenggara Penunjang.

13

Diisi dengan nama calon Peserta/Peserta.

SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI NAMA DAN JABATAN PIMPINAN YANG AKAN MELAKUKAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS, BI-SSSS, DAN/ATAU SISTEM BI-ETP

Nomor : ¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal: **Pemberitahuan Penanda Tangan Perjanjian**

Dengan ini diberitahukan nama pimpinan yang akan menandatangani perjanjian penggunaan (Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)² antara ³ dengan Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Nama : ⁴
Jabatan : ⁵
Alamat : ⁶
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Dst.

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...⁷ berdasarkan ...⁸ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...⁹ dengan *participant code*...¹⁰ merupakan pimpinan yang akan menandatangani perjanjian penggunaan (Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹¹ antara ...¹² dengan Bank Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tanda tangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan.

² Dipilih salah satu

³ Diisi dengan nama badan hukum Peserta.

⁴ Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan.

⁵ Diisi dengan jabatan pimpinan.

⁶ Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan.

⁷ Diisi dengan nama badan hukum Peserta.

⁸ Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal).

Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal..... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....).

⁹ Diisi dengan nama badan hukum Peserta.

¹⁰ Diisi dengan *participant code* Peserta.

¹¹ Dipilih salah satu

¹² Diisi dengan nama badan hukum Peserta.

31

SURAT KUASA
No. ¹

00000043

Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan**

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi pejabat kami sebagai berikut:

1.

Nama

:

1
- Jabatan

:

2
- Alamat

:

3
2.

Nama

:
- Jabatan

:
- Alamat

:

3. Dst.,
untuk dipergunakan dalam kepesertaan pada (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)⁴.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan surat kuasa nomor ... tanggal

Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini nama (nama-nama) tersebut di atas tidak melakukan pembuatan spesimen tanda tangan maka permohonan pembuatan spesimen tanda tangan atas nama pihak yang bersangkutan **kami nyatakan batal**. Selanjutnya, untuk keperluan pembuatan spesimen atas nama yang bersangkutan, kami akan mengajukan surat permohonan baru mengenai pembuatan spesimen tanda tangan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tanda tangan dan stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan]⁵
Jabatan

1

Diisi dengan nama sesuai identitas ~~pimpinan~~ atau pejabat penerima kuasa pimpinan.

2

Diisi dengan jabatan ~~pimpinan~~ atau pejabat penerima kuasa pimpinan.

3

Diisi dengan alamat sesuai identitas ~~pimpinan~~ atau pejabat penerima kuasa pimpinan.

4

Pilih salah satu sesuai permohonan.

5

Ditandatangani oleh Pimpinan dalam hal permohonan pembuatan spesimen diajukan untuk pertama kali.

**Daftar Nama Pihak yang Diwakili¹ dan/atau Informasi Pihak yang Diwakili
oleh Peserta Dalam Melakukan Transaksi**

No.	Pemilik transaksi (<i>Bidder</i>)	Peserta BI-ETP sebagai pengirim penawaran/ <i>bidding</i> (<i>Submitter</i>)	Setelmen Surat Berharga		Setelmen Dana		Ket ²
			Pihak Pelaksana Setelmen	Rekening Surat Berharga	Bank Pembayar	Rekening Setelmen Dana	
1.							
2.							
3.	Dst.						

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tanda tangan dan stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹ Penyampaian daftar nama pihak yang diwakili dan perubahannya.
² Diisi apabila terdapat penambahan/penghapusan pihak yang diwakili dan/atau informasi pihak yang diwakili oleh Peserta Sistem BI-ETP.

Surat Penunjukan Peserta Sistem BI-ETP

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Penunjukan Pihak yang Mewakili**

Dalam rangka penunjukan Peserta Sistem BI-ETP yang mewakili pihak lain dalam Transaksi melalui Sistem BI-ETP, dengan ini kami:

- 1. Nama Peserta :
 - 2. Kode Peserta (*Participant code*) :
- menyampaikan data Peserta Sistem BI-ETP¹ sebagai berikut:

No	Nama	Kode Peserta (<i>Participant Code</i>)	Keterangan
1			
2			
dst			

Demikian, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama Peserta]

Meterai,
Rp10.000,

[Tanda tangan Peserta dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹ Diisi dengan informasi penunjukan/penghentian Peserta Sistem BI-ETP.

Surat Konfirmasi Sub-Registry

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Konfirmasi sebagai Sub-Registry**

Dengan ini kami menyatakan setuju untuk ditunjuk sebagai *Sub-Registry* untuk dan atas nama:

Nama Peserta :
Kode Peserta (*Participant code*):
dalam kegiatan operasional Sistem BI-ETP yang menggunakan mata uang rupiah/valuta asing/rupee dan valuta asing,¹ dan pelaksanaan Setelmen Surat Berharga serta fungsi lainnya sebagai berikut:

No	Fungsi	Ya	Tidak
1.	Pembebanan biaya Sistem BI-ETP		
2.	Pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia terkait		

Surat konfirmasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Penyelenggara.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tanda tangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹ Pilih salah satu.

Surat Penunjukan Bank Pembayar/Bank Penerima SKNBI

No. ...

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Penunjukan Bank Pembayar/Bank Penerima⁴**

Sehubungan dengan permohonan kami sebagai PLA/PTL¹, dengan ini kami menyampaikan data PLU yang kami tunjuk sebagai Bank Pembayar/Bank Penerima¹ yaitu:

- 1. Kode Peserta :
- 2. Nama Peserta :
- 3. Nomor Rekening Giro Rupiah :
- 4. Nama Rekening Giro Rupiah :

dalam rangka:

(khusus untuk PLU sebagai Bank Pembayar)

- 1. penyediaan *Prefund* Kredit;
- 2. Setelmen Dana;
- 3. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
- 4. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

(khusus untuk PLU sebagai Bank Penerima)

- 1. penyediaan *Prefund* Kredit;
- 2. pengiriman DKE melalui SKNBI;
- 3. Setelmen Dana;
- 4. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
- 5. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

Berkaitan dengan penunjukan Bank Pembayar/Bank Penerima¹ tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan surat konfirmasi dan surat kuasa dari Bank Pembayar/Bank Penerima¹ sebagaimana terlampir.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Yang membuat pernyataan,

Meterai,
Rp10.000,

Tanda tangan dan stempel perusahaan

(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

⁴ Pilih salah satu

Surat Penunjukan Bank Pembayar Peserta BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP
No. ...

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Penunjukan Bank Pembayar**

Dalam rangka penunjukan Bank Pembayar dalam operasional (BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP)¹, dengan ini kami:

- 1. Nama Peserta :
 - 2. Kode Peserta (*Participant code*) :
- menyampaikan data Bank Pembayar sebagai berikut:

a. Penunjukan Bank Pembayar

No	Nama Bank Pembayar	Kode Peserta (<i>Participant Code</i>)	No. Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar	Fungsi	Mata Uang	Keterangan
1	 ²					
2						
dst						

b. Penghentian Penunjukan Bank Pembayar

No	Nama Bank Pembayar	Kode Peserta (<i>Participant Code</i>)	No. Rekening Setelmen Dana Bank Pembayar	Fungsi	Mata Uang	Keterangan
1	 ³					
2						
dst						

Sehubungan dengan penunjukan Bank Pembayar tersebut, bersama ini kami sampaikan Surat Konfirmasi dan Surat Kuasa dari Bank Pembayar sebagaimana terlampir.
Demikian, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tanda tangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹ Pilih salah satu
² Nomor 1 diisi dengan nama Bank Pembayar yang melakukan fungsi:
a. pembebanan biaya BI-SSSS;
b. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia terkait;
c. Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga; dan
d. menerima pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan nilai pokok/nominal jatuh waktu.
Nomor 2 dan seterusnya diisi dengan nama Bank Pembayar yang melakukan Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga.
³ Nomor 1 diisi dengan nama Bank Pembayar yang melakukan fungsi:
a. pembebanan biaya BI-SSSS;
b. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia terkait;
c. Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga; dan
d. menerima pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan nilai pokok/nominal jatuh waktu.
Nomor 2 dan seterusnya diisi dengan nama Bank Pembayar yang melakukan Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga.

Surat Konfirmasi Bank Pembayar/Bank Penerima Peserta SKNBI

No. ...

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Konfirmasi Bank Pembayar/Bank Penerima**⁶

Berkenaan dengan permohonan ⁷ sebagai PLA/PTL¹ dan penunjukan kami sebagai Bank Pembayar/Bank Penerima¹, dengan ini kami menyatakan setuju untuk ditunjuk sebagai Bank Pembayar/Bank Penerima¹ sehubungan dengan pelaksanaan:

(khusus untuk PLU sebagai Bank Pembayar)

1. penyediaan *Prefund* kredit;
2. Setelmen Dana;
3. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
4. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal,

(khusus untuk PLU sebagai Bank Penerima)

1. penyediaan *Prefund* kredit;
2. pengiriman DKE melalui SKNBI;
3. Setelmen Dana;
4. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
5. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal,

untuk kepentingan nasabah kami sebagai berikut:

Nama :

Alamat :

Surat konfirmasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Yang membuat pernyataan,

Meterai,
Rp10.000,

Tanda tangan dan stempel perusahaan

(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)

(Jabatan)

⁶ Pilih salah satu.

⁷ Nama calon PLA/PTL.

75

Surat Konfirmasi Bank Pembayar Peserta Sistem BI-ETP dan/atau BI-SSSS

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Konfirmasi sebagai Bank Pembayar**

Dengan ini kami menyatakan setuju untuk ditunjuk sebagai Bank Pembayar untuk dan atas nama:

Nama Peserta :
Kode Peserta (*participant code*) :
dalam kegiatan operasional (BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP)¹ yang menggunakan mata uang rupiah/valuta asing/rupee dan valuta asing,² sebagai berikut:

No	Fungsi	Ya	Tidak
1.	Pembebanan biaya Sistem BI-ETP dan/atau BI-SSSS		
2.	Pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia		
3.	Pembebanan Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga untuk BI-SSSS		
4.	Penerimaan kupon/bunga atau imbalan dan/atau nilai pokok/nominal Surat Berharga untuk BI-SSSS		

Berkaitan dengan penunjukan sebagai Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen Dana atas transaksi (Sistem BI-ETP dan/atau BI-SSSS)³, kami akan melakukan pengelolaan (*setting broker bidding limit* dan/atau data *limit*)⁴ Setelmen Dana pada (Sistem BI-ETP dan/atau BI-SSSS)⁵.

Surat konfirmasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Penyelenggara.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai, Rp10.000,	[Tanda tangan dan stempel badan hukum]
-----------------------	---

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

1 Pilih salah satu.
2 Pilih salah satu.
3 Pilih salah satu.
4 Pilih salah satu.
5 Pilih salah satu.

SURAT KUASA

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:¹

- | | | | | |
|----|---------|---|-------|---|
| 1. | Nama | : | | 2 |
| | Jabatan | : | | 3 |
| | Alamat | : | | 4 |
| 2. | Nama | : | | |
| | Jabatan | : | | |
| | Alamat | : | | |

3. Dst.

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (nama badan hukum) berdasarkan ...⁵ Kode Peserta (*participant code*) selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**, dengan ini memberikan kuasa (tanpa hak substitusi/dengan satu kali hak substitusi)⁶ kepada:

- | | | | | |
|----|---------|---|-------|---|
| 1. | Nama | : | | 7 |
| | Jabatan | : | | 8 |
| | Alamat | : | | 9 |
| 2. | Nama | : | | |
| | Jabatan | : | | |
| | Alamat | : | | |

3. Dst.

selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**,

K H U S U S

bertindak [sendiri atau (berdua atau bertiga atau lebih dengan Penerima Kuasa lainnya)]¹⁰ melakukan hal sebagaimana tersebut di bawah ini:¹¹

1. penandatanganan surat menyurat dan/atau dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹²;
2. penyerahan *certificate signing request* dan/atau pengelolaan *user* beserta perangkat pengamanannya dalam operasional (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP);
3. penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan, dan dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹³; dan/atau
4. penyerahan dan/atau pengambilan *user* beserta perangkat pengamanannya dalam operasional (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP),

di Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia ¹⁴

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi.

² Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan.

³ Diisi dengan jabatan pimpinan.

⁴ Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan.

⁵ Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut:

(anggaran dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal).

Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum/PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal..... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....).

⁶ Pilih salah satu.

⁷ Diisi dengan nama sesuai identitas pejabat yang menerima kuasa.

⁸ Diisi dengan jabatan pejabat yang menerima kuasa.

⁹ Diisi dengan alamat sesuai identitas nama pejabat yang menerima kuasa.

¹⁰ Dipilih dan diisi salah satu "sendiri" atau "berdua" atau "bertiga" dan seterusnya serta kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab Peserta sepenuhnya.

¹¹ Disesuaikan dengan jenis kepesertaan dan kebutuhan Peserta.

¹² Pilih salah satu.

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Pilih salah satu.

61

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak pembuatan spesimen tanda tangan.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tanda tangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan Pemberi Kuasa]
Jabatan

21

SURAT KUASA
No.

Yang bertandatangan di bawah ini:¹

1.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

2.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

3. Dst,
(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (nama badan hukum) berdasarkan ...⁵ Kode Peserta (*participant code*) selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**, dengan ini memberikan kuasa (tanpa hak substitusi kepada:

1.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

2.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

3. Dst,
selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**,

K H U S U S

bertindak sendiri melakukan pengambilan surat, laporan, dan dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)⁹.

di Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia ¹⁰

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pembuatan spesimen tanda tangan.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tanda tangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang menerima
kuasa dengan hak substitusi]
Jabatan

¹ Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi.
² Diisi dengan nama sesuai identitas pejabat.
³ Diisi dengan jabatan pejabat.
⁴ Diisi dengan alamat sesuai identitas pejabat.
⁵ Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut:
(anggaran dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal).
Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum/PT diisi sebagai berikut:
(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal.....yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....).
⁶ Diisi dengan nama sesuai identitas petugas.
⁷ Diisi dengan jabatan petugas.
⁸ Diisi dengan alamat sesuai identitas petugas.
⁹ Pilih salah satu.
¹⁰ Pilih salah satu.

26

SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK PENERUS PESERTA SKNBI

No. ...¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Permohonan Menjadi Bank Penerus**

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Bank Penerus.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. surat pernyataan masuk kategori kelompok bank berdasarkan modal inti minimal (KBMI) 4;
2. surat pernyataan kesiapan teknologi informasi yang mendukung operasional sebagai Bank Penerus;
3. struktur organisasi Bank Penerus; dan
4. surat pernyataan telah menerapkan manajemen risiko.

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan kepesertaan adalah:

Nama :
Telepon/HP :
E-mail :

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel perusahaan

(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

¹ Diisi dengan nomor Surat Permohonan Menjadi Bank Penerus Peserta SKNBI

76

Surat Permohonan Perubahan Kegiatan Usaha

No. ...¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal: **Permohonan Perubahan Kegiatan Usaha**

Menunjuk Surat Keputusan ...² nomor ...³ tanggal ...⁴ perihal ...⁵ sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa Peserta dengan data sebagai berikut:

- 1. Nama Peserta :
- 2. Kode Peserta (*Participant code*) : ⁶
- 3. Nomor Rekening Setelmen Dana : ⁷

telah melakukan perubahan kegiatan usaha dari Bank umum konvensional menjadi Bank umum syariah dengan nama ...⁸. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan perubahan kepesertaan dalam (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)⁹ terkait perubahan kegiatan usaha yang dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal ...¹⁰.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan fotokopi kelengkapan persyaratan dokumen (dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang/dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta)¹¹ yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa:

- 1. akta perubahan anggaran dasar;
- 2. surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari otoritas yang berwenang; dan
- 3. surat keputusan dari lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha mengenai izin perubahan kegiatan usaha dari Bank umum konvensional menjadi Bank umum syariah;

Adapun pejabat yang dapat dihubungi terkait dengan perubahan kegiatan usaha adalah:

Nama : 12
Telepon/HP : 13
E-mail : 14

¹ Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
² Diisi dengan nama lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha.
³ Diisi dengan nomor Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha.
⁴ Diisi dengan tanggal Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha.
⁵ Diisi dengan perihal Surat Keputusan lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha.
⁶ Diisi dengan *participant code*.
⁷ Diisi khusus untuk peserta Sistem BI-RTGS.
⁸ Diisi dengan bank hasil konversi.
⁹ Pilih salah satu.
¹⁰ Diisi dengan tanggal efektif operasional.
¹¹ Pilih salah satu.
¹² Diisi dengan nama pejabat yang dapat dihubungi.
¹³ Diisi dengan nomor telepon/*handphone* pejabat yang dapat dihubungi.
¹⁴ Diisi dengan *email* pejabat yang dapat dihubungi.

26

Demikian permohonan kami.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tandatangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

71

Surat Pernyataan Tetap Diberlakukannya Spesimen Tanda Tangan Pimpinan

No. ...¹

SURAT PERNYATAAN

- Yang bertanda tangan di bawah ini:
- 1. Nama : ²
Jabatan : ³
Alamat : ⁴
 - 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
 - 3. Dst.

bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...⁵ berdasarkan ...⁶ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...⁷, Kode Peserta (*participant code*) ...⁸, nomor Rekening Setelmen Dana ...⁹, dengan ini menyatakan bahwa spesimen tanda tangan atas nama:

- 1. Nama : ¹⁰
Jabatan : ¹¹
Alamat : ¹²
- 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
- 3. Dst,

yang disebutkan dalam surat pemberitahuan kewenangan pimpinan nomor ...¹³ tanggal ...¹⁴ dan/atau surat kuasa nomor ...¹⁵ tanggal ...¹⁶ yang ditatausahakan di (Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia ...¹⁷)¹⁸, kami nyatakan masih tetap berlaku.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tandatangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹ Diisi dengan nomor surat pernyataan.
² Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan atau penerima kuasa pimpinan yang berwenang.
³ Diisi dengan jabatan pimpinan atau penerima kuasa pimpinan yang berwenang.
⁴ Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan atau penerima kuasa pimpinan yang berwenang.
⁵ Diisi dengan nama Peserta.
⁶ Diisi sesuai dengan bentuk hukum Peserta.
Untuk Bank dan non Bank berbadan hukum PT diisi sebagai berikut:
(Anggaran Dasar PT ... yang dimuat dalam Akta tanggal ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta ... tanggal ...).
Untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut:
(Surat Keputusan Gubernur ... nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah ...).
⁷ Diisi dengan nama Peserta.
⁸ Diisi dengan *participant code* Peserta.
⁹ Diisi dengan nomor rekening setelmen dana dalam hal merupakan Peserta Sistem BI-RTGS.
¹⁰ Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan atau penerima kuasa pimpinan yang berwenang yang spesimen tanda tangannya masih tetap berlaku.
¹¹ Diisi dengan jabatan pimpinan atau penerima kuasa Pimpinan yang berwenang yang spesimen tanda tangannya masih tetap berlaku.
¹² Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan atau penerima kuasa pimpinan yang berwenang yang spesimen tanda tangannya masih tetap berlaku.
¹³ Diisi dengan nomor surat pemberitahuan kewenangan pimpinan yang baru.
¹⁴ Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan kewenangan pimpinan yang baru.
¹⁵ Diisi dengan nomor surat kuasa.
¹⁶ Diisi dengan tanggal surat kuasa.
¹⁷ Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
¹⁸ Pilih salah satu dan surat pernyataan dibuat per masing-masing wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Surat Permohonan Penambahan dan/atau Pergantian Kuasa Pejabat yang Berwenang dan/atau Petugas

No. ...¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal: **Permohonan Penambahan dan/atau Pergantian Kuasa Pejabat Yang Berwenang dan/atau Petugas**

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan pejabat yang berwenang dan/atau petugas sebagaimana tertuang dalam surat kuasa nomor ...² tanggal ...³, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan susunan pejabat yang berwenang dan/atau petugas dalam rangka pelaksanaan kepesertaan dalam (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)⁴ sebagai berikut:

1. Perubahan Pejabat Penerima Kuasa Pimpinan⁵

NO.	DATA PEJABAT PENERIMA KUASA	SEMULA	MENJADI
1.	Nama ⁶		
	Jabatan ⁷		
	Alamat ⁸		
2.	Nama		
	Jabatan		
	Alamat		
3.	Dst.		

2. Perubahan Petugas⁹

NO.	DATA PETUGAS	SEMULA	MENJADI
1.	Nama ¹⁰		
	Jabatan ¹¹		
	Alamat ¹²		
2.	Nama		
	Jabatan		
	Alamat		
3.	Dst.		

¹ Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
² Diisi dengan nomor akta.
³ Diisi dengan tanggal akta.
⁴ Pilih salah satu.
⁵ Diisi apabila terdapat perubahan pejabat yang berwenang.
⁶ Diisi dengan nama sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa.
⁷ Diisi dengan jabatan direksi atau pejabat pemberi kuasa.
⁸ Diisi dengan alamat sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa.
⁹ Diisi apabila terdapat perubahan petugas.
¹⁰ Diisi dengan nama sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa.
¹¹ Diisi dengan jabatan direksi atau pejabat pemberi kuasa.
¹² Diisi dengan alamat sesuai identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa.

67

Bersama surat ini kami sampaikan dokumen administrasi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ...
2. Fotokopi identitas diri ...
3. dst¹³.

Selanjutnya sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami menyampaikan hal sebagai berikut¹⁴:

1. Mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi pejabat yang berwenang yang belum memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara yaitu:
 - a. Nama:
 - b. Nama:
 - c. Dst.
2. Mengajukan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan dari Penyelenggara.
3. Kewenangan (pejabat yang berwenang atau petugas)¹⁵ sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melakukan kegiatan operasional melalui (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP)¹⁶ berlaku paling lambat 5 (lima) hari kerja¹⁷ terhitung sejak pembuatan spesimen tanda tangan¹⁸.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tandatangan dan stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹³ Diisi apabila ada informasi yang dapat ditambahkan.

¹⁴ Diisi dalam hal terdapat pengajuan spesimen baru dan/atau perubahan kewenangan pejabat.

¹⁵ Pilih sesuai kebutuhan.

¹⁶ Pilih salah satu.

¹⁷ Pilih salah satu sesuai kebutuhan.

¹⁸ Dicantumkan apabila ada penambahan pejabat yang berwenang/petugas baru.

61

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA

No. ...¹

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA

- Yang bertanda tangan di bawah ini:
- 1. Nama : ²
Jabatan : ³
Alamat : ⁴
 - 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
 - 3. Dst.

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ...⁵ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...⁶, kode Peserta (*participant code*) ...⁷, nomor Rekening Setelmen Dana ⁸, dengan ini menyatakan bahwa kuasa atas nama:

- 1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
- 3. Dst.

yang tertuang dalam surat kuasa nomor ...⁹ tanggal ...¹⁰ yang ditatausahakan di (Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia ...¹¹)¹² dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, terhitung sejak disetujui oleh Penyelenggara.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai,
Rp10.000,

[Tandatangan dan
stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹ Diisi dengan nomor surat pernyataan.
² Diisi dengan nama sesuai identitas pimpinan atau pejabat pemberi kuasa.
³ Diisi dengan jabatan pimpinan atau pejabat pemberi kuasa.
⁴ Diisi dengan alamat sesuai identitas pimpinan atau pejabat pemberi kuasa.
⁵ Diisi sesuai dengan bentuk hukum.
Untuk Bank dan non Bank/Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank berbadan hukum PT diisi sebagai berikut:
(Anggaran Dasar PT ... yang dimuat dalam Akta tanggal ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta ... tanggal ...).
Untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut:
(Surat Keputusan Gubernur ... nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah ... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ... tanggal ... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah ...).
⁶ Diisi dengan nama Peserta.
⁷ Diisi dengan *participant code* Peserta.
⁸ Diisi dengan nomor rekening setelmen dana, dalam hal Peserta merupakan Peserta Sistem BI-RTGS
⁹ Diisi dengan nomor surat kuasa.
¹⁰ Diisi dengan tanggal surat kuasa.
¹¹ Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
¹² Pilih salah satu.

61

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN BANK PENERUS PESERTA SKNBI

No. ...¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Permohonan Perubahan Bank Penerus**

Sehubungan dengan penunjukan kami sebagai Bank Penerus, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan sebagai Bank Penerus dari ...² untuk menggantikan ...³, dengan data sebagai berikut:

1. Kode Peserta :
2. Nama Peserta :
3. Nomor Rekening Setelmen Dana :
4. Nama Rekening Setelmen Dana :

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. surat penunjukan sebagai Bank Penerus;
2. surat konfirmasi Bank Penerus;
3. surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana Bank Penerus;
4. fotokopi perjanjian dengan Peserta Tidak Langsung; dan
5. surat konfirmasi dari ...³ mengenai persetujuan perubahan Bank Penerus.

Adapun pejabat kami yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan tersebut di atas adalah:

Nama :
Telepon/HP :
E-mail :

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan stempel perusahaan

(Nama pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan bank penerus Peserta SKNBI

² Diisi dengan nama PTL

³ Diisi dengan nama Bank Penerus yang lama

**SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN LOKASI INFRASTRUKTUR PESERTA
DAN/ATAU PEMINDAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA PESERTA**

No. ...¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Surat Permohonan Perubahan Lokasi Infrastruktur Peserta
dan/atau Pemindahan Jaringan Komunikasi Data Sistem
BI-RTGS/SKNBI/BI-SSSS/Sistem BI-ETP²**

Sehubungan dengan perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan Jaringan Komunikasi Data dalam Sistem BI-RTGS/SKNBI/BI-SSSS/Sistem BI-ETP³, dengan ini kami:

- a. Nama Peserta :
- b. Kode Peserta :

menyampaikan permohonan perubahan data sebagai berikut:

No.	Jenis Perubahan	Sebelumnya	Menjadi
1.			
2.			
dst			

Berkaitan dengan perubahan data dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan Jaringan Komunikasi Data dalam Sistem BI-RTGS/SKNBI/BI-SSSS/Sistem BI-ETP⁴.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel perusahaan

(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data Peserta.
² Pilih salah satu.
³ Pilih salah satu.
⁴ Pilih salah satu.

**SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN ATAU PENGHENTIAN
KEIKUTSERTAAN PESERTA DALAM WILAYAH KLIRING**

No. ...¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Permohonan Penambahan/Penghentian² Keikutsertaan ...³
dalam Wilayah Kliring**

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi bersama ini kami sampaikan permohonan penambahan/penghentian¹ keikutsertaan ...⁴ dalam Wilayah Kliring ...⁵ dengan tanggal efektif ...⁶

Adapun pejabat kami yang dapat dihubungi terkait dengan permohonan penambahan/penghentian⁷ adalah:

Nama :
Telepon/HP :
E-mail :

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)

Tanda tangan dan stempel perusahaan

(Nama Pimpinan/pejabat yang berwenang)
(Jabatan)

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan penambahan atau penghentian keikutsertaan Peserta dalam wilayah kliring
² Pilih salah satu
³ Diisi nama Peserta
⁴ Diisi nama Peserta
⁵ Diisi nama Wilayah Kliring.
⁶ Diisi dengan tanggal efektif permohonan penambahan/penghentian keikutsertaan dalam Wilayah Kliring
⁷ Pilih salah satu

21

SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN KEPESERTAAN

No. ...¹

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 2
JAKARTA 10350

Perihal : **Penutupan Kepesertaan (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)²**

Sehubungan dengan (penggabungan/peleburan/pemisahan/*self-liquidation*/pengunduran diri/alasan lain berupa ...³)⁴ berdasarkan persetujuan/keputusan dari ...⁵ no. ...⁶ tanggal ...⁷ perihal ...⁸ (sebagaimana terlampir), dengan ini kami ...⁹, kode Peserta (*participant code*) ...¹⁰ mengajukan permohonan penutupan kepesertaan (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹¹ sebagai berikut:

1. Penutupan kepesertaan dalam (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹² agar dilakukan pada tanggal ...¹³
2. Pengalihan hak dan kewajiban terkait operasional (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹⁴ dari Peserta (....)¹⁵ kepada Peserta (....)¹⁶ hasil penggabungan/hasil peleburan/hasil pemisahan/*self-liquidation*/pengunduran diri/alasan lain¹⁷, terhitung sejak tanggal penggabungan/peleburan/pemisahan/*self-liquidation*/pengunduran diri/alasan lain¹⁸ secara hukum, namun pelaksanaan penutupan kepesertaan dalam (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹⁹ dilakukan sesuai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pencabutan spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa pimpinan dari Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan/*self-liquidation*/pengunduran diri/alasan lain²⁰ terhitung sejak tanggal penggabungan/peleburan/pemisahan/*self-liquidation*/pengunduran diri/alasan lain²¹ secara hukum sebagai berikut:
 - a. ²²
 - b.
 - c. dst.

Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

[Tandatangan dan stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

¹ Diisi dengan nomor surat permohonan.
² Pilih salah satu.
³ Diisi dengan alasan lain dalam hal Peserta melakukan penutupan kepesertaan karena alasan lain.
⁴ Pilih salah satu.
⁵ Diisi dengan: 1) persetujuan dari lembaga yang berwenang memberikan izin penggabungan, peleburan, pemisahan, atau likuidasi; atau 2) keputusan dari forum pengambilan keputusan di internal Peserta untuk penutupan kepesertaan di luar penggabungan, peleburan, pemisahan, likuidasi, atau alasan lain.
⁶ Diisi dengan nomor surat persetujuan dari lembaga yang berwenang.
⁷ Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan dari lembaga yang berwenang.
⁸ Diisi dengan perihal surat persetujuan dari lembaga yang berwenang.
⁹ Diisi dengan nama Peserta.
¹⁰ Diisi dengan kode Peserta (*participant code*).
¹¹ Pilih salah satu.
¹² Pilih salah satu.
¹³ Diisi dengan tanggal permohonan penutupan kepesertaan.
¹⁴ Pilih salah satu.
¹⁵ Diisi dengan nama Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan.
¹⁶ Diisi dengan nama Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan.
¹⁷ Pilih salah satu.
¹⁸ Pilih salah satu.
¹⁹ Pilih salah satu.
²⁰ Pilih salah satu.
²¹ Pilih salah satu.
²² Diisi dengan nama pimpinan dan/atau pejabat dari Peserta yang berwenang mewakili yang dicabut spesimen tanda tangannya.

**SURAT PEMBERITAHUAN PESERTA YANG MENERIMA PENGGABUNGAN/
PESERTA HASIL PELEBURAN/PESERTA HASIL PEMISAHAN**

No. ...¹

Kepada:

Bank Indonesia

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

c.q. Divisi Layanan Nasabah dan Perizinan

Gedung Kebon Sirih Lantai 2

Jl. M.H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Perihal: **Pemberitahuan (Penggabungan/Peleburan/Pemisahan)**²

Sehubungan dengan persetujuan dari ...³ nomor ...⁴ tanggal ...⁵ perihal ...⁶ sebagaimana fotokopi terlampir, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta nomor ...⁷, tanggal ...⁸, ditetapkan bahwa Peserta yang bertindak sebagai (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan/Peserta yang menerima pemisahan)⁹ adalah ...¹⁰ dengan kode Peserta (*participant code*) ...¹¹, dan nomor Rekening Setelmen Dana ...¹², dengan (Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang memisahkan diri)¹³ sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Kode Peserta (<i>Participant Code</i>)
1.		
2.	Dst.	

2. (Penggabungan/peleburan/pemisahan)¹⁴ berlaku sejak tanggal persetujuan ...¹⁵, namun pelaksanaan peralihan operasional dalam penyelenggaraan (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹⁶ dari (Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan diri/memisahkan diri)¹⁷ kepada (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan/Peserta yang menerima pemisahan)¹⁸ dilakukan pada tanggal ...¹⁹.
3. Pemindahan saldo dari (Rekening Surat Berharga/Rekening Giro)²⁰ (Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang melakukan pemisahan)²¹ sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke rekening (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/ Peserta hasil pemisahan)²² akan kami laksanakan pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Selanjutnya kepesertaan atas nama (Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang memisahkan diri)²³ sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar dihentikan pada tanggal

¹ Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.

² Pilih salah satu.

³ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang memberikan izin kegiatan usaha.

⁴ Diisi dengan nomor surat keputusan lembaga yang berwenang.

⁵ Diisi dengan tanggal surat keputusan lembaga yang berwenang.

⁶ Diisi dengan perihal surat keputusan lembaga yang berwenang.

⁷ Diisi dengan nomor akta penggabungan/peleburan/pemisahan.

⁸ Diisi dengan tanggal anggaran dasar.

⁹ Pilih salah satu.

¹⁰ Diisi dengan nama Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan.

¹¹ Diisi dengan kode Peserta (*participant code*) yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan.

¹² Diisi dengan nomor Rekening Setelmen Dana, dalam hal Peserta merupakan Peserta Sistem BI-RTGS.

¹³ Pilih salah satu.

¹⁴ Pilih salah satu.

¹⁵ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.

¹⁶ Pilih salah satu.

¹⁷ Pilih salah satu.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Diisi dengan tanggal pelaksanaan penggabungan/peleburan/pemisahan dalam Sistem BI-ETP.

²⁰ Diisi dalam hal Peserta merupakan Peserta BI-SSSS dan/atau Sistem BI-RTGS.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

²³ Pilih salah satu.

sebagaimana dimaksud pada angka 2.

5. Segala hak dan kewajiban (Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan diri/memisahkan diri)²⁴ diambil alih oleh (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan/Peserta yang menerima pemisahan)²⁵ terhitung sejak tanggal (penggabungan/peleburan/pemisahan)²⁶ secara hukum.
6. Dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban (Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang memisahkan diri)²⁷ sebagaimana dimaksud pada angka 1 terhadap Bank Indonesia yang timbul sebelum tanggal persetujuan (*legal*) dari ...²⁸ namun belum diperhitungkan ke (Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang memisahkan diri)²⁹ yang bersangkutan sampai dengan tanggal pelaksanaan peralihan operasional dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar diperhitungkan ke (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan/Peserta yang menerima pemisahan)³⁰.
7. Pada tanggal ...³¹ kami telah mengumumkan mengenai (penggabungan/peleburan)³² Bank dalam surat kabar harian yang berskala nasional.

Sehubungan dengan pelaksanaan (penggabungan/peleburan/pemisahan)³³, terlampir kami sampaikan:

1. Surat pernyataan dari Peserta yang menerima (penggabungan/peleburan/pemisahan)³⁴;
2. fotokopi izin (penggabungan/peleburan/pemisahan)³⁵ dari lembaga yang berwenang memberikan persetujuan tentang (penggabungan/peleburan/pemisahan)³⁶;
3. fotokopi akta (penggabungan/peleburan/pemisahan)³⁷;
4. fotokopi akta perubahan anggaran dasar Peserta yang menerima penggabungan, atau Akta Pendirian (Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan)³⁸ dalam hal pemisahan dilakukan dengan membentuk badan hukum baru;
5. fotokopi surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum atau dokumen pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, atau keputusan dari Kementerian Hukum mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
6. fotokopi pengumuman (penggabungan/peleburan)³⁹ yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional;
7. dst.⁴⁰

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]

[Nama badan hukum]

[Tandatangan dan stempel badan hukum]

[Nama Pimpinan/Pejabat yang berwenang]

Jabatan

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Pilih salah satu.

²⁸ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.

²⁹ Pilih salah satu.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Diisi dengan tanggal pengumuman penggabungan/peleburan/pemisahan Bank dalam surat kabar.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu.

³⁴ Pilih salah satu.

³⁵ Pilih salah satu.

³⁶ Pilih salah satu.

³⁷ Pilih salah satu.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Diisi dengan dokumen lain yang dilampirkan (apabila ada).

SURAT PERNYATAAN PIMPINAN BAHWA CALON PESERTA TIDAK SEDANG DALAM PROSES LIKUIDASI ATAU KEPAILITAN BAGI CALON PESERTA TIDAK LANGSUNG

No. ...¹

SURAT PERNYATAAN

- Yang bertanda tangan di bawah ini:²
1. Nama : 3
Jabatan : 4
Alamat : 5
 2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
 3. Dst.

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili ...⁶ berdasarkan ...⁷ dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili ...⁸, dengan ini menyatakan bahwa ...⁹ tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan tersebut tidak benar, maka ...¹⁰ bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Penyelenggara SKNBI atau otoritas yang berwenang.

(Kota), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
(Nama Institusi)
Yang membuat pernyataan,

Meterai,
Rp10.000,-

Tanda tangan dan stempel
institusi

Nama Pimpinan
(Jabatan)

¹ Diisi dengan nomor surat pernyataan.
² Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah.
³ Diisi dengan nama sesuai identitas Pimpinan.
⁴ Diisi dengan jabatan Pimpinan.
⁵ Diisi dengan alamat sesuai identitas Pimpinan.
⁶ Diisi dengan "Direksi" untuk Peserta yang berbadan hukum PT atau diisi dengan jabatan Pimpinan untuk Peserta yang merupakan institusi Pemerintah.
⁷ Diisi berdasarkan bentuk badan hukum calon Peserta sebagai berikut:
(Anggaran Dasar nomor..... yang dimuat dalam Akta tanggal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta tanggal).
Khusus untuk BPD yang tidak berbadan hukum PT diisi sebagai berikut:
(Surat Keputusan Gubernur nomor tanggal dan berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Nomor tanggal..... yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor tanggal yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.....).
⁸ Diisi dengan nama calon Peserta.
⁹ Diisi dengan nama calon Peserta.
¹⁰ Diisi dengan nama calon Peserta.

**SURAT PERNYATAAN DARI PESERTA YANG MENERIMA PENGGABUNGAN/
PELEBURAN/PEMISAHAN**

No. ...¹

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, jabatan, tempat tinggal
2. Nama, jabatan, tempat tinggal
3. Dst.

dalam hal ini mewakili ...² yang bertindak sebagai (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan)³;
untuk Peserta yang (menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan)⁴ sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Kode Peserta (<i>Participant Code</i>)
1.		
2.	Dst.	

berdasarkan Akta (Penggabungan/Peleburan/Pemisahan)⁵ nomor ...⁶ tanggal ...⁷ dan persetujuan (penggabungan/peleburan/pemisahan)⁸ dari ...⁹ nomor ...¹⁰, tanggal ...¹¹, perihal ...¹² dengan ini kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. mengambil alih seluruh hak dan kewajiban Peserta yang (menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan)¹³ terhitung sejak tanggal ...¹⁴;
2. mengambil alih wewenang dan tanggung jawab seluruh kegiatan operasional dan kepesertaan yang terkait dengan (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)¹⁵ atas nama Peserta yang (menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan)¹⁶ terhitung sejak tanggal (penggabungan/peleburan/pemisahan)¹⁷ berlaku secara hukum.
3. Dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban (Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang memisahkan diri)¹⁸ sebagaimana dimaksud pada angka 1 terhadap Bank Indonesia yang timbul sebelum tanggal persetujuan (*legal*) dari ...¹⁹ namun belum diperhitungkan ke (Peserta yang menggabungkan diri/Peserta yang meleburkan diri/Peserta yang melakukan pemisahan yang bersangkutan)²⁰ sampai dengan tanggal pelaksanaan (penggabungan/peleburan/pemisahan kepesertaan)²¹ dalam (Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP)²² sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar diperhitungkan ke Peserta yang menerima

¹ Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
² Diisi dengan nama Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan.
³ Pilih salah satu.
⁴ Pilih salah satu.
⁵ Pilih salah satu.
⁶ Diisi dengan nomor akta Penggabungan/Peleburan/Pemisahan.
⁷ Diisi dengan tanggal akta Penggabungan/Peleburan/Pemisahan.
⁸ Pilih salah satu.
⁹ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
¹⁰ Diisi dengan nomor persetujuan Penggabungan/Peleburan/Pemisahan dari lembaga yang berwenang.
¹¹ Diisi dengan tanggal persetujuan Penggabungan/Peleburan/Pemisahan dari lembaga yang berwenang.
¹² Diisi dengan perihal persetujuan Penggabungan/Peleburan/Pemisahan dari lembaga yang berwenang.
¹³ Pilih salah satu.
¹⁴ Diisi tanggal secara hukum ditetapkannya penggabungan/peleburan/pemisahan oleh lembaga yang berwenang.
¹⁵ Pilih salah satu.
¹⁶ Pilih salah satu.
¹⁷ Pilih salah satu.
¹⁸ Pilih salah satu.
¹⁹ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
²⁰ Pilih salah satu.
²¹ Pilih salah satu.
²² Pilih salah satu

- (penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan)²³.
4. Terhitung sejak tanggal persetujuan (penggabungan/peleburan/pemisahan)²⁴ secara hukum dari ...²⁵, spesimen tanda tangan beserta kewenangan dari direksi dan pejabat penerima kuasa dari (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan)²⁶ yang telah ditatausahakan di Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kami nyatakan masih berlaku adalah sebagai berikut:
- a. Direksi
- 1)
 - 2)
 - 3) dst.
- b. Pejabat penerima kuasa direksi dari (Peserta yang menerima penggabungan/Peserta hasil peleburan/Peserta hasil pemisahan)²⁷ adalah:
- 1) ...
 - 2) ...
 - 3) dst.

Adapun spesimen tanda tangan dan kewenangan direksi dan pejabat yang namanya tidak tercantum pada huruf a dan huruf b, sejak tanggal persetujuan (penggabungan/peleburan/pemisahan)²⁸ secara hukum ...²⁹, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

5. Terhitung sejak tanggal persetujuan (penggabungan/peleburan/pemisahan)³⁰ secara hukum dari ...³¹, spesimen tanda tangan beserta kewenangan dari direksi dan/atau pejabat penerima kuasa Peserta yang (menggabungkan diri/meleburkan diri/melakukan pemisahan)³² kami nyatakan tidak berlaku kecuali untuk direksi dan/atau pejabat penerima kuasa di kantor Bank Indonesia yang dituangkan dalam butir 4.a dan 4.b surat pernyataan ini.
6. (Penggabungan/Peleburan/Pemisahan)³³ yang akan dan/atau telah dimuat dalam surat kabar nasional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]
[Nama badan hukum]

Meterai, Rp10.000,	[Tandatangan dan stempel badan hukum]
-----------------------	--

[Nama Direksi/Pejabat yang berwenang]
Jabatan

²³ Pilih salah satu
²⁴ Pilih salah satu
²⁵ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
²⁶ Pilih salah satu.
²⁷ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
²⁸ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
²⁹ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
³⁰ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
³¹ Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
³² Diisi dengan nama lembaga yang berwenang.
³³ Pilih salah satu